

ANALYSIS OF KOMPAS NEWSPAPER'S PERSPECTIVE ON INDONESIAN POLITICAL DYNAMICS IN 1998

Analisis Perspektif Surat Kabar Kompas terhadap Dinamika Politik Indonesia Pada Tahun 1998

Angelica Jolie Melvin ^{1a(*)} Aulia Fitriany ^{2b} M Khusni Mubarak ^{3c}

¹²³ Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Delta Sidoarjo

^a melvinangelicajolie@gmail.com

^b auliafitriaany28@gmail.com

^c mrchusny@gmail.com

(*) Corresponding Author
melvinangelicajolie@gmail.com

How to Cite: Angelica Jolie Melvin. (2026). Analysis of Kompas Newspaper's Perspective on Indonesian Political Dynamics in 1998 [doi: 10.36526/js.v3i2.6073](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.6073)

Received : 15-08-2025
 Revised : 21-09-2025
 Accepted: 31-12-2025

Keywords:

Media Perspective,
 Political Dynamics 1998,
 Kompas.

Abstract

The purpose of this research is to see how Kompas Newspaper viewed Indonesia's political development in 1998, especially in the context of transition after the fall of New Order regime. This research focuses on three main aspects: 1) Results the research shows that Kompas Newspaper was first established on June 28 1965 by P.K. Ojong and Jakob Oetama. Kompas was created because the Indonesian Catholic Community needed an independent and reliable communication medium. It has journalism principle that must be cautious, neutral, and focused on the public interest. 2) After the New Order regime collapsed in May 1998, Indonesia entered a period of political transition towards open democracy. Kompas functioned as a strategic media that bridged the public interest with the dynamics that occurred among the political elite. In 1999, Kompas discussed many important issues such as democratic elections after the New Order and the strengthening of democratic institutions such as the DPR and the Supreme Court through news, editorials, and opinion sections. 3) Kompas' perspective on political change since 1998 can be categorized as constructive, although critical. This media shows the decline of the New Order as an important momentum to rebuild a fair and democratic political order. Kompas actively criticized various government policies, including addressing corruption, human rights violations, and political instability. This study uses a descriptive qualitative method with the approach of content analysis of news archives, editorials, and opinions published in Kompas newspaper during 1998-1999. The study shows that Kompas has a strong history as a media that maintains independence and prudence in handling political issues. During the New Order era, Kompas was an important media that carried out transformation, enabling discussions on democratization, information disclosure, and reformation.

PENDAHULUAN

Surat kabar merupakan salah satu media massa yang penting dalam menyediakan informasi dan menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita (McQuail, 2010). Harian Kompas merupakan salah satu surat kabar paling berpengaruh di Indonesia, yang didirikan oleh dua tokoh penting dalam pers, yaitu P.K. Ojong dan Jakob Oetama. P.K. Ojong merupakan jurnalis yang dikenal dengan integritas moral dan kecerdikan dalam bisnis media. Bersama Jakob Oetama seorang pemikir dan wartawan kelahiran Magelang, kedua tokoh ini membentuk fondasi yang kuat bagi Kompas dan kelompok usaha Kompas Gramedia. Sebelum mendirikan Kompas, mereka juga menggagas majalah intisari pada awal 1960 sebagai wadah edukasi dan informasi populer. Jakob Oetama berperan penting dalam membentuk arah redaksional Kompas, terutama melalui tajuk rencana yang ditulis secara rutin selama bertahun-tahun. Semangat kedua tokoh ini menjunjung

etika jurnalistik dan pemikiran kritis menjadikan Kompas tidak hanya sebagai sarana media informasi tetapi juga sebagai instrumen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia (Kurniawan & Nurcahyo, 2013).

Tahun 1998 menjadi salah satu titik balik paling krusial dalam sejarah politik Indonesia. Krisis multidimensi ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi Indonesia. Lebih dari tiga dekade berkuasa, presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, mencapai puncaknya. Media massa, termasuk harian Kompas, memainkan peran penting dalam opini publik di tengah keadaan yang tidak menentu pada saat itu. Untuk merefleksikan dinamika politik serta menjadi ruang artikulasi tuntutan dan kegelisahan masyarakat. Media telah dikontrol secara ketat oleh pemerintahan (Orde Baru) dengan membredel majalah atau surat kabar kritis, dan menjnakan media yang menimbulkan kegaduhan atau kekacauan umum (Sari et al., n.d.,2022).

Surat kabar Kompas memainkan peran penting dalam meliput membentuk opini publik mengenai dinamika politik Indonesia. Pada tahun 1998 reformasi politik membawa perubahan signifikan. Era reformasi Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru membawa perubahan mendasar dalam paradigma pemerintahan (Suriadi et al., 2023). Kompas merupakan surat kabar terbesar dan berpengaruh di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam melaporkan dan menanggapi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi menjelang, selama dan sesudah reformasi. Kecermataan dalam memilih sudut pandang, kehati-hatian dalam penyaji informasi, dan ketepatan dalam membaca arah politik menjadikan Kompas sebagai sumber data penting dalam memahami bagaimana media turut serta dalam proses transisi demokrasi. Surat kabar adalah jenis media cetak yang menyajikan liputan atau kejadian nyata tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat pada saat itu (Melani et al., 2019).

Surat kabar adalah media informasi tertulis yang membutuhkan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Agar pesan yang disampaikan dapat dipahami secara jelas oleh pembaca. Oleh karena itu, struktur bahasa yang disampaikan harus juga diperhatikan. Penelitian terkait sebelumnya, dilakukan oleh Nurjaman (2012) yang mengkaji *Pandangan Surat Kabar Kompas Dan Republika Terhadap Politik Di Timor Timur Pada 1993-1999*, dengan menyoroti peristiwa Santa Cruz hingga pasca jajak pendapat. Penelitian ini mengungkapkan perbedaan perspektif kedua dalam menyingkapi isu HAM dan dinamika politik Timor Timur. Sementara itu, Fardiah dan Darmawan (2014) menganalisis *Framing Pemberitaan Verifikasi Partai Politik Menjelang Pemilu 2014*, menunjukkan bahwa Kompas cenderung mendukung otoritas KPU sebagai lembaga resmi, sedangkan Republika lebih menyoroti KPU sebagai pihak yang menyalahgunakan wewenang. Adapun Febriyanti (2016) meneliti peran signifikan surat kabar Kompas dalam *Pemberitaan Reformasi 1998*, dan menyimpulkan bahwa Kompas tampil kritis terhadap kelemahan pemerintahan Orde Baru serta menjadi media yang menonjol dalam menyuarakan semangat reformasi.

Surat kabar perlu menggunakan bahasa tulis yang memerlukan perhatian tambahan struktur kebahasaannya, sejak tahun 1965 Kompas telah menjadi surat kabar nasional Indonesia yang berbasis di Jakarta. PT Kompas Media Nusantara, sebuah divisi dari Kompas Gramedia perusahaan yang menerbitkan surat kabar. Dikatakan bahwa Kompas menyajikan berita yang lebih kritis, sesuai dengan fakta, dan tidak memihak kelompok atau partai (Ananta Harvianty Putri & Haryadi, 2024). Pasca runtuhnya rezim orde baru 1998 Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan kebebasan pers, dan pemilu yang demokratis. Surat kabar Kompas memainkan peran penting sebagai media informasi, pendidik politik, dan kontrol sosial bagi masyarakat dalam konteks ini. Tahun 1999 merupakan tahun yang penting juga karena untuk pertama kalinya setelah lebih dari tiga dekade Indonesia melaksanakan pemilu yang relatif bebas dan demokratis. Kompas tidak hanya menyampaikan berita tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang sistem politik baru, seperti pentingnya keterlibatan warga negara dalam pemilu dan pengawasan terhadap wakil rakyat, opini, editorial, dan kolom tokoh memberikan wawasan politik yang membantu masyarakat menjadi pemilih yang sadar dan kritis.

Kebaharuan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pemberitaan Kompas terhadap dinamika politik tahun 1998, dengan fokus pada krusial bulan Mei yang ditandai

dengan demonstrasi besar-besaran, kerusuhan sosial, dan perubahan rezim. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kajian ini akan mengurai bagaimana Kompas membongkai isu-isu politik, memilih diksi serta memposisikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran media dalam dinamika politik serta memperlihatkan bagaimana narasi media dapat menjadi bagian dari kekuatan sosial politik yang mengarahkan perubahan sejarah. Peran Kompas dalam membangun opini publik melalui pemberitaan yang komprehensif dan relatif objektif yang turut membangun opini publik dan mendorong tuntutan reformasi. Kredibilitas Kompas sebagai sumber informasi yang terpercaya berperan penting dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap situasi politik yang berkembang. Peran Kompas dalam meliputi politik Indonesia tahun 1998 sangat kompleks. Disatu sisi Kompas beroperasi di baawan tekanan politik yang ketat tetapi disisi lain, surat kabar ini secara bertahap meningkatkan kritik terhadap pemerintah. Pemberitaan Kompas meskipun tidak selalu eksplisit tetapi turut berkontribusi pada perubahan politik yang terjadi pada tahun tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis perspektif surat kabar Kompas terhadap dinamika politik Indonesia pada tahun 1998. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman makna yang terkandung dalam pemberitaan secara mendalam, kontekstual dan interpretatif tanpa menggunakan statistik. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap bagaimana Kompas memposisikan diri sebagai media informasi politik selama periode transisi orde baru ke era reformasi. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial politik sebagaimana direpresentasikan melalui bahasa dan struktur narasi media serta, menafsirkan makna dibalik kontruksi pemberitaan (Creswell, 2014). Sumber data primer dan sumber sekunder adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah arsip Harian Kompas edisi Mei 1998, khususnya pada tanggal-tanggal berikut: *15 Mei 1998 Bandara Soekarno Hatta Jadi Tempat Mengungsi*, *19 Mei 1998 Ribuan Mahasiswa ke DPR; Mendesak, Diadakannya Sidang Istimewa MPR*, *21 Mei 1998 Selamat Datang Pemerintahan Baru*, arsip tersebut diperoleh dalam bentuk digital melalui dokumentasi visual yang disebarluaskan oleh akun instagram @kompasdata. Data utama ini diperoleh dari artikel ilmiah dan opini tokoh nasional yang dimuat dalam surat kabar terkait. Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, artikel dan buku yang berjudul *50 Tahun Kompas Memberi Makna*. Buku ini memuat refleksi sejarah perjalanan jurnalistik Kompas selama lima dekade, termasuk peran surat kabar ini dalam menghadapi dinamika sosial politik nasional. Buku ini memperkuat pemahaman terhadap posisi redaksional Kompas yang berkomitmen pada prinsip jurnalisme berimbang, berpihak pada kepentingan publik, serta menolak agitasi politik yang berlebihan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menelaah teks-teks berita dan artikel opini dari Harian Kompas. Proses ini mencakup pengambilan gambar (scanning) halaman depan maupun artikel dalam, serta penelusuran kembali makna simbolik dari judul, kutipan tokoh, dan narasi yang disampaikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles and Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu: Reduksi data yang menyaring dan memilih bagian artikel yang relevan untuk dianalisis seperti judul utama, isi narasi, dan kutipan tokoh. Penyanjian data menyusun narasi informasi dalam bentuk narasi tematik berdasarkan isu yang dibahas Kompas, seperti transisi kekuasaan, peran mahasiswa, krisis sosial, dan rekonsiliasi nasional. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi menyimpulkan makna dan kecenderungan sikap media dari teks-teks berita, serta memverifikasinya melalui triangulasi data dengan sumber literatur ilmiah. Untuk menjaga validitasi data penelitian ini diperoleh melalui teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan membandingkan berbagai edisi harian Kompas dan narasi yang muncul disetiap tanggal penting selama Mei 1998.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sejarah awal mulanya surat kabar Kompas

Surat kabar Kompas pada mulanya didirikan atas usulan Jendral Ahmad Yani untuk membuat surat kabar yang dapat mengimbangi para Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok lainnya (Kompas.com, 2022). Pertama kalinya media ini diberi nama "*Bentara Rakyat*", namun nama tersebut diganti atas saran presiden Soekarno menjadi Kompas secara simbolis menggambarkan fungsi media penunjuk arah bagi masyarakat (Kompas.com, 2020). Filosofi ini menjadi dasar bahwa media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membimbing arah berpikir publik ke rasional dan beradab.

Harian Kompas pertama kali didirikan pada 28 Juni 1965 oleh dua tokoh yaitu P.K. Ojong dan Jakob Oetama. Dipicu oleh kebutuhan komunitas Katolik akan media komunikasi yang independen, berimbang, dan dapat dipercaya menjadi sejarah awal permulaan Kompas terlahir khususnya di tengah dinamika politik Indonesia. Menerapkan prinsip Jurnalisme kehati-hatian netralitas, dan yang mengutamakan kepentingan publik. Gaya redaksional dikenal dengan tidak provokatif, tetapi tetap lebih kritis dalam menyampaikan realitas sosial politik. Kompas merupakan media yang bertujuan menyuarakan nilai-nilai humanisme, pluralisme, dan keseimbangan ditengah arus pemberitaan yang saat itu cenderung ideologis dan partisan.

Mengenai pluralitas Kompas secara aktif merawat nilai pluralisme dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, dengan menghadirkan tulisan yang mendorong dialog dan pengharagaan dalam keberagaman (Hamidi, 2011). Membangun prinsip-prinsip ini, Kompas menjadi salah satu koran terbesar di Indonesia dengan posisi yang strategis dalam mempengaruhi wacana publik dan opini masyarakat. Berdasarkan prosesnya, Kompas mengembangkan jurnalisme yang berorientasi pada kehati-hatian yakni gaya peliputan yang menghindari konfrontasi langsung dengan kekuasaan, namun tetap menyuarakan kritik secara implisit dan tersirat. Faktor sejarah juga berperan untuk Kompas berhati-hati dalam membuat berita yang dibalut dengan unsur humanisme sebagai refleksi dari pendirinya (Muthaqin et al., 2021). Strategi ini merupakan warisan langsung dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama, yang meyakini bahwa jurnalisme harus menjadi alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar alat politik. Kompas menempatkan diri bukan sebagai media perjuangan ideologi tertentu, melainkan sebagai media yang menyuarakan kepentingan publik dan menjaga stabilitas sosial melalui bahasa jurnalistik yang santun dan edukatif.

Peran Surat Kabar Kompas sebagai Media Pasca Era Reformasi Politik Tahun 1999

Runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998, Indonesia memasuki masa transisi politik yang ditandai oleh penguatan kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Masa ini surat kabar Kompas memainkan peran strategis sebagai media arus utama yang tidak hanya menyampaikan media informasi, tetapi juga menjadi aktor penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Tahun 1999 menjadi titik penting karena Indonesia pertama kalinya sejak 1955 menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis. Konteks ini menjadikan peran Kompas sebagai penyedia informasi yang kredibel dan pengawal proses transisi menuju tantangan demokratis. Sejak awal dikenal sebagai media yang netral dan berorientasi pada kepentingan publik, Kompas tampil sebagai penyeimbang informasi ditengah pemberitaan kepentingan politik.

Kompas menjadi media yang mampu menyajikan pemberitaan secara berimbang dan mengungkapkan kelemahan-kelemahan rezim lama serta menggambarkan harapan dan dinamika baru yang muncul dalam masyarakat setelah tumbanganya Orde Baru. Selain sebagai penyaji informasi Kompas juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan yang sedang berganti arah. Undang-undang Pers 40 tahun 1999, media massa memperoleh ruang yang lebih luas untuk bersuara, dalam konteks ini, memperkuat Kompas sebagai pengawas demokrasi dan pendidik

politik, yang mengawasi jalannya kebijakan, mengkritisi pelaksanaan kekuasaan, dan menjadi medium diskusi publik.

Kompas tampil sebagai pengawas berimbang, mendukung reformasi dan transisi kekuasaan sambil menjaga etika jurnalistik (Wijayanto & Masduki, 2024). Pemberitaan pada periode Januari-Maret 1999 tema politik dan pemerintahan mendominasi halaman depan Kompas, mengganti pola sebelumnya yang lebih cenderung ke isu konflik dan bencana, dengan pergeseran arah pemberitaan dari positif ke kritis dan argumentatif terhadap presiden dan elite politik (Yuniarwan, 2011). Surat kabar Kompas menyediakan narasi untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Rubrik opini laporan analitis, dan diskusi pemilu yang membantu publik memahami pilihan politik dan mekanisme pemerintahan. Berdasarkan laporan yang dijelaskan Kompasiana.com (2023) mengenai *pers pasca reformasi*, Kompas menjadi agen perubahan dan kontrol sosial yang sehat.

Perspektif Surat Kabar Kompas terhadap Perubahan Politik Indonesia Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru 1998

Pasca runtuhnya rezim orde baru pada Mei 1998, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah politik yang menuju proses sistem demokrasi terbuka. Fase yang penuh ketidakpastian ini, media massa memainkan peran penting sebagai penyalur informasi, dan penyedia ruang publik. Tepat pada tanggal 14 Mei 1998, harian Kompas memberitakan pernyataan presiden Soeharto di Kairo Mesir, dan kerusuhan massa di Jakarta tersebut gelombang unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah terus terjadi dipicu krisis ekonomi serta ketidakpuasan atas pemerintah yang dinilai sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta represif, presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan menutup 32 tahun periode kekuasaan. Surat kabar Kompas dalam konteks ini, menampilkan perspektif yang kritis namun konstruktif terhadap perubahan arah politik yang terjadi di Indonesia. Surat kabar Kompas melihat kejatuhan Orde Baru bukan sekedar pergantian rezim, tetapi menjadi momentum sejarah yang membangun tantangan politik yang adil dan demokratis. Pemberitaan sejak Mei hingga akhir 1999, surat kabar ini menyoroti berbagai aspek perubahan politik dari mundurnya Presiden Soeharto, naiknya B.J. Habibie, hingga pemilu 1999.

Menurut laporan wartawan senior Kompas Julian Sihombing 1998, situasi pada 12 Mei 1998 semakin diperparah oleh gonjang-ganjing politik yang telah berlangsung sejak penyerbuan ke markas DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta pada 18 Juli 1996. Peristiwa ini menimbulkan korban tewas, luka-luka dan orang hilang sekaligus memantik solidaritas nyata dari gerakan mahasiswa. Pemerintah yang mulai panik melihat gelombang protes, merespon dengan langkah represif. Militer mengumumkan larangan aksi di luar kampus, namun perlawanan mahasiswa tidak terbendung. Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terus terjadi di berbagai titik di Jakarta, mengakibatkan korban luka-luka di kedua belah pihak. Pada periode ini pula terjadi penculikan terhadap sejumlah aktivis oleh militer. Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat penembakan dalam aksi massa. Peristiwa tersebut memicu kerusuhan besar keesokan harinya, berupa pembakaran dan penjarahan di berbagai wilayah Jakarta. Jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 500 orang, sementara kerugian materiil ditaksir sebesar Rp 2,5 triliun. Peristiwa ini menjadi salah satu lembar kelam dalam sejarah Indonesia.

Editorial Kompas yang menegaskan pentingnya menjaga reformasi agar tidak berhenti dipermukaan, tetapi menyentuh struktur budaya politik yang lebih mendasar. Meskipun Kompas tetap terbuka dan kritis terhadap pemerintahan, gaya jurnalistik tetap mengutamakan kehati-hatian dan bahasa yang santun. Ini ditunjukkan berdasarkan edisi harian Kompas 21 Mei 1998, yang menunjukkan bahwa surat kabar tersebut mengambil posisi yang moderat tentang peralihan kekuasaan presiden Soeharto ke B.J. Habibie. Hal ini ditunjukkan dari judul utama halaman depan yaitu, "Selamat Datang Pemerintahan Baru" yang mengandung makna simbolik penerimaan terhadap perubahan, namun disampaikan dengan bahasa yang netral dan tidak provokatif. Kompas tidak secara langsung mengkritik Presiden Soeharto namun menyuarakan dukungan terhadap

tuntutan reformasi melalui kutipan tokoh-tokoh bangsa. Artikel yang berjudul "Yang Terbaik, Pak Harto Mundur" yang ditulis oleh Nurcholish Madjid.

Narasi keputusan bahwa Soeharto Mundur adalah langkah terhormat, pandangan ini menunjukkan bahwa Kompas menggunakan pendekatan moral dan intelektual dalam menilai krisis politik bukan agitasi. Kompas juga menampilkan pidato Sultan Hamengkubuwono X, yang mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintahan baru demi kelangsungan reformasi. Dukungan dari tokoh ini ditampilkan dalam headline penting, memperkuat pesan bahwa perubahan kekuasaan bukan sekedar tekanan jalanan, tetapi juga memiliki legitimasi dari tokoh adat dan budaya.



Gambar 1. Harian Kompas, Kamis 21 Mei 1998 Halaman depan

Perspektif lain dari surat kabar Kompas dapat dilihat dari artikel bertajuk "Kita Masuki Babakan Baru" menunjukkan bahwa Kompas mendorong narasi rekonsiliasi dan keterbukaan. Alih-alih mendorong konflik atau dendam politik, Kompas mengajak untuk melihat reformasi sebagai kesempatan membangun masa depan bangsa secara bersama-sama. Artikel tersebut ditekankan pentingnya pengawasaan terhadap pemerintahan baru, bukan semata-mata mengganti penguasa. Ini menunjukkan Kompas tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai media dengan cara konstruktif. Kompas mengarahkan pembaca untuk memahami isu politik secara komprehensif, bukan sekedar menilai dari aspek emosional atau kepentingan elit (Effendy, 2022).



Gambar 2. Harian Kompas, Kamis 21 Mei 1998

Pembahasan

Sejarah Perkembangan Awal Mula Kompas Sebagai Surat Kabar

Dunia *pers* Indonesia ditandai oleh keterbelahaan ideologis dan intervensi kuat dari banyak negara. Tahun 1960-an banyak surat kabar baik yang mendukung pemerintah maupun yang dimiliki partai politik mengalami penyosoran dan pembredelan. Kehadiran Kompas sebagai media yang tidak secara terang-terangan mengusung agenda partai, merupakan bentuk inovasi model bisnis dan model komunikasi politik. Keputusan redaksional Kompas untuk tidak menyerang pemerintah secara langsung, tetapi memberikan informasi yang mendalam tentang fakta dan pendapat, yang menjadi strategi pembedaan media dari sezamannya. Kemunculan Kompas pada 28 Juni 1965 adalah hasil dari pergeseran kebutuhan akan sumber informasi yang dapat diandalkan ditengah kehancuran identitas media nasional menjelang akhir demokrasi terpimpin.

Media cenderung terbelah secara ideologis antara condong ke pemerintah, dan suara partai politik. Kompas hadir membawa alternatif, media yang berorientasi publik, etika jurnalis, dan kehati-hatian redaksional. Suasana *pers* yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah, penerbitan yang dipenuhi suasana kekacauan politik dan ekonomi (Suwirta, 2017). Alih-alih terlahir sebagai proyek politik, Kompas berkembang sebagai inisiatif yang mengusung profesionalisme dalam jurnalisme, meskipun didorong oleh komunitas Katolik sejak awal Kompas tidak menampilkan keagamaan secara eksplisit dalam pemberitaan. Pendekatan ini mencerminkan strategi inklusif, yaitu bagaimana media berusaha merangkul pembaca lintas identitas dan kepentingan dalam satu bingkai komunikasi yang netral. Kompas tidak semata-mata karena isi pemberitaannya, tetapi juga karena kemampuan menavigasi struktur kekuasaan dengan cermat.

Kerangka teori strukturasi media, kita memahami bahwa media tidak berdiri bebas dari tekanan eksternal melainkan justru, beroperasi diantara kedua yang membentuk nilai, gaya, dan strategi adaptif yang menjaga identitasnya. Kompas merupakan media yang mengidentifikasi pembawaan kepentingan suara hati rakyat, yang menyampaikan berita aktual dan kontroversi. Ideologi yang diterapkan oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama dalam menjalankan tugas sebagai wartawan adalah untuk selalu santun dalam mengkritik situasi dengan elegan hal ini mereka terapkan juga kepada para pekerja Kompas atau wartawan Kompas lainnya. Tujuan perjalanan Kompas ini adalah untuk membantu kemajuan Indonesia dengan bersandar pada kemajemukannya, namun hal itu tidak selalu berhasil. Surat kabar ini sempat dilarang terbit sebelumnya, pada 2 Oktober 1965 Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya melarang semua surat kabar terbit, dengan alasan untuk menyatukan informasi dan mengurangi kebingungan masyarakat tentang peristiwa yang terjadi pada gerakan 30 September 1965.

Pada 4 Oktober 1965, Kompas diberi izin kembali untuk terbit. Pertumbuhan Kompas dibangun dalam menyajikan informasi yang dipercaya oleh pembacanya. Identitas sebagai surat kabar nasional tidak diperoleh melalui kampanye ideologis, melainkan lewat ketekunan menyusun kredibilitas dari bawah, dari berita harian ke editorial, dari suara publik ke tajuk rencana. Dilansir dari buku *50 Tahun Kompas Memberi Makna*, (2015) dijelaskan bahwa keberhasilan Kompas bukan semata karena keberpihakan politiknya, melainkan karena kemampuannya membaca ruang batin masyarakat yang membutuhkan informasi yang menenangkan dan mencerahkan, bukan membakar emosi. Surat kabar Kompas, salah surat kabar terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam memengaruhi opini publik dan wacana publik. Kompas juga mengembangkan jurnalisme yang berorientasi, berhati-hati, dan memiliki gaya liputan yang menghindari konfrontasi langsung dengan kekuasaan tetapi tetap menyuarakan kritik secara simbolik dan tersirat.

Fungsi Surat Kabar Kompas dalam Demokrasi Tahun 1999

Dinamika politik merupakan proses perebutan kekuasaan, perubahan kebijakan publik, konflik kepentingan antara aktor politik serta penyesuaian institusi negara terhadap tuntutan masyarakat (Budiardjo, 2008). Proses dan transformasi yang terjadi dalam kehidupan politik suatu negara atau masyarakat dikenal sebagai dinamika politik. Mencakup perubahan kebijakan, pergeseran kekuasaan, dan hubungan antara berbagai aktor politik termasuk pemerintahan, partai

politik masyarakat sipil dan media. Kepemimpinan pemerintahan atau kebijakan pemerintah dapat mengubah politik. Surat kabar adalah jenis media cetak yang berisi berbagai informasi, seperti berita, opini dan iklan, yang diterbitkan secara berkala dan berfungsi sebagai alat penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat (Romli, 2012).

Tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru, di mana Pemilu demokratis pertama diselenggarakan setelah lebih dari tiga dekade kekuasaan yang terpusat. Media memegang peranan penting dalam membentuk ruang publik yang bebas, terbuka, dan informatif. Surat kabar Kompas, sebagai salah satu media arus utama di Indonesia, memainkan fungsi strategis dalam mendukung demokrasi melalui pemberitaannya yang menyentuh aspek kontrol kekuasaan, pendidikan politik, dan fasilitasi opini publik. Kompas secara konsisten menyajikan laporan mendalam mengenai perkembangan politik menjelang dan selama Pemilu 1999. Melalui berita utama, laporan khusus, hingga tajuk rencana. Kompas berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, tata cara pemilihan umum, dan dinamika partai politik pasca reformasi. Hal ini sejalan dengan teori fungsi pers dalam demokrasi (McQuail, 1987) yang menyebutkan bahwa pers harus mampu menginformasikan dan mendidik publik sebagai syarat berlangsungnya demokrasi yang sehat.

Surat kabar menggunakan istilah *pers* dalam arti sempit. Media atau *pers* sangat penting bagi pemerintahan dan rakyat. Undang-undang nomor 40 tahun 1999 pasal 3 membahas mengenai fungsi *pers* nasional, yang meliputi: 1) *pers* nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 2) disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), *pers* nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi (Wibowo, 2016). Melalui pelaporan yang lebih kritis terhadap pejabat publik dan institusi negara, Kompas meningkatkan fungsi kontrol sosial. Ini terlihat dalam liputan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia, korupsi, dan dinamika DPR dan MPR menjelang sidang umum. Kompas juga menjalankan fungsi *check and balance* yang merupakan komponen penting dari demokrasi.

Salah satu cara efektif untuk menghasilkan generasi yang dapat dilihat keragaman sebagai sesuatu yang harus dihargai secara konstruktif adalah pendidikan (Fitriany & Wibowo, 2019). Berperan sebagai institusi media, Kompas turut menjalankan fungsi edukatif dalam masyarakat, dimana pemberitaan dan narasi yang berperan sebagai pendidikan politik masyarakat. Kompas memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui rubrik opini. Memperkuat fungsi *pers* sebagai forum deliberatif, yang sesuai menjadi media wadah dialog masyarakat dalam merumuskan demokrasi. Pemilihan umum 1999 merupakan pemilu legislatif pertama yang diselenggarakan di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002, namun B.J. Habibie memutuskan untuk mempercepat pemilu tersebut. Publik yang mendesak agar diadakannya reformasi serta mengganti parlemen yang dianggap berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya (Tempo.co 2022).

Reformasi bukan hanya sekadar perubahan simbolik, melainkan gerakan sadar dari mahasiswa dan masyarakat sipil yang aktif mendorong transformasi politik. Gerakan mahasiswa menjadi penggerak utama menyuarakan tuntutan perubahan menyeluruh, transisi ini terjadi ketika Soeharto menggundurkan diri dan memberikan jalan bagi reformasi politik struktural dan peran media menjadi salah satu pilar penting dalam proses demokrasi (Dewi, 2024). Setahun setelah kejatuhannya Orde Baru, pemilihan umum untuk legislatif diadakan. Partisi Demokratik menyatakan bahwa mereka diinstruksikan untuk melakukan tindakan massa ekstra parlementer selama pemilu yang diadakan setelah jatuhnya Orde Baru. (Susilo, 2018).

Pendekatan ini membuat Kompas menjadi salah satu media yang dipercaya publik, sekalipun mampu bertahan ditengah tekanan politik yang keras. Pemilu menciptakan legitimasi untuk pemerintahan baru dan menciptakan harapan baru untuk perbaikan dalam kehidupan politik dan sosial. Selain itu, pemilu tahun 1999 memicu kebangkitan kesadaran politik di kalangan masyarakat meningkatkan partisipasi dalam diskusi politik dan aksi sosial. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, pemilu menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia karena menandai transisi menuju demokrasi dan memberikan harapan baru bagi masyarakat. Pemilu ini juga menjadi

landasan untuk membangun sistem politik yang lebih inklusif dan partisipatif di masa depan. Proses demokrasi harus dihadiri dengan keterbukaan institusi, pembaharuan hukum, dan partisipasi rakyat. Peran ini menjadikan Kompas sebagai media yang menjalankan fungsi informasi, edukasi politik, dan kontrol sosial selama masa proses demokrasi pasca era orde baru.

Perspektif *Framing* Berita Harian Kompas Tahun 1998

Framing adalah pendekatan penting dalam studi media, yang menjelaskan bagaimana suatu isu itu dikonstruksi dan disampaikan oleh media untuk mempengaruhi cara pandang khalayak. Reformasi politik tahun 1998 menjadi momentum kritis yang membentuk ulang arah pemberitaan media, termasuk harian Kompas. Kompas sebagai peran media utama, yang tidak hanya melaporkan fakta tetapi juga membingkai (*Framing*) peristiwa tahun 1998 melalui narasi yang hati-hati dan konstruktif. Tahun 1998 merupakan peristiwa penting dalam sejarah politik, yang ditandai dengan sejak pertengahan 1997 berdampak luas terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik. Harga kebutuhan pokok yang tinggi, pengangguran meningkat, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto meluas.

Kompas berperan penting sebagai media yang mencerminkan dinamika perubahan tersebut. Melalui pemberitaannya Kompas menunjukkan adanya pergeseran posisi dari yang semula lebih berhati-hati terhadap kekuasaan, menjadi lebih terbuka dalam menyoroti krisis kepemimpinan nasional. Tajuk-tajuk rencana yang dimuat selama bulan Mei 1998 banyak menyoroti kegagalan pemerintahan dalam merespon krisis serta mendukung aspirasi reformasi yang diungkapkan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil, namun demikian Kompas tetap menjaga etika jurnalistik. Alih-alih menyerang Soeharto secara frontal Kompas lebih menekankan pentingnya perubahan struktural, akuntabilitas kepemimpinan, dan kebutuhan akan reformasi total diberbagai sektor termasuk politik, ekonomi, dan hukum. Istilah wacana kritis tidak hanya menjelaskan tentang makna penelitian bahasa, tetapi juga dapat digunakan dalam bidang penelitian apapun dengan mempertimbangkan penggunaan bahasa dan struktur gaya wacana dan wawancara (Alfira et al., 2019). Surat kabar juga sebagai pemberi informasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang menggambarkan segala sesuatu yang sedang berlangsung disekitar dengan memberikan titik terang kepada para pembaca tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang berlangsung (Suharyanto, 2016).

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai perspektif *framing* berita harian Kompas Selama peristiwa tahun 1998:

Melalui artikel berita harian Kompas dengan judul "Kebangkitan Mahasiswa di Hari Reformasi Nasional". Kompas menempatkan mahasiswa sebagai bagian penting dalam dinamika politik 1998. Menggunakan istilah "*kebangkitan*", surat kabar ini menampilkan gerakan mahasiswa bukan sekadar aksi massa, tetapi sebagai bagian dari sejarah reformasi, namun demikian Kompas tetap menjaga jarak dari glorifikasi berlebihan. Artikel ini lebih bersifat deskriptif dan reflektif sehingga mengarahkan opini pembaca pada pentingnya kesadaran kolektif, bukan hanya perlawanan. Kompas membingkai aksi mahasiswa bukan sebagai bentuk perlawanan melainkan sebagai kebangkitan moral rakyat yang menuntut perubahan secara damai dan konstitusional. Kompas tidak hanya melaporkan peristiwa tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat agar melihat reformasi sebagai kebutuhan bersama, dan mahasiswa sebagai representasi suara nurani rakyat. Pemberitaan Kompas cenderung menggambarkan tragedi Mei 1998 dengan fokus pada aspek inteligensia dan kemanusiaan, bukan menyudutkan secara politis (Salman et al., 2023).



Gambar 3. Harian Kompas, edisi Kamis 21 Mei 1998

Berdasarkan arsip Harian Kompas edisi 15 Mei 1998 menjelaskan situasi pasca kerusuhan menyebabkan bandara Internasional Soekarno Hatta berubah fungsi menjadi tempat pengungsian. Artikel yang berjudul “Bandara Soekarno Hatta Jadi Tempat Mengungsi” menggambarkan kondisi darurat dimana sejumlah warga terutama yang tinggal di kawasan Cengkareng dan sekitarnya memilih mengungsi ke bandara dengan alasan keamanan. Hotel-hotel dan terminal di dalam kawasan bandara bahkan dipenuhi dengan warga yang panik dan mencari perlindungan. Kompas melaporkan bahwa banyak penumpang yang tidak lagi fokus pada keberangkatan atau kedatangan, melainkan lebih pada mencari tempat aman. Penerbangan pun dibatalkan atau terganggu akibat situasi tersebut. Pernyataan dari pejabat bandara dan kementerian perhubungan juga menunjukkan adanya penyesuaian operasional dan pembatalan penerbangan, khususnya tujuan domestik. Kejadian ini menandakan adanya skala krisis yang sangat berdampak pada mobilitas warga sipil dan operasional sektor transportasi nasional, selama peristiwa Mei 1998 yang mempengaruhi sejumlah warga Indonesia untuk mencari tempat perlindungan akibat dampak dari peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan Kompas empati terhadap warga sipil yang menjadi korban suasana mencekam. Lapornya juga menyebutkan bahwa respon institusional yang positif, memberikan toleransi dan pelayanan yang tambahan. Kritik yang dikeluarkan Kompas tetap secara implisit mendesak negara untuk mengembalikan kondisi secara aman melalui respon cepat terhadap krisis, disimpulkan bahwa Kompas tetap meringkai dengan narasi yang humanis, tenang dan tidak provokatif.



Gambar 4. Arsip harian Kompas edisi 15 Mei 1998

Arsip harian Kompas lainnya edisi 19 Mei 1998 menjelaskan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek memadati pelataran gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah agar segera mengadakan sidang

istimewa MPR. Hal ini ditunjukkan dengan adanya gerakan mahasiswa telah mencapai tingkat tuntutan politik yang sangat konkret dan terorganisir. Harian surat kabar ini berjudul “Ribuan Mahasiswa ke DPR; Mendesak, Diadakannya Sidang Istimewa MPR” Sebagaimana dilaporkan oleh Harian Kompas edisi 19 Mei 1998, para mahasiswa mendesak lembaga legislatif agar segera menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR untuk menyikapi kondisi darurat nasional yang terjadi saat itu.

Situasi disekitar digambarkan sangat padat, dengan mahasiswa bahkan beristirahat dan tidur di halaman gedung DPR. Gerakan ini dilengkapi dengan aksi damai, orasi politik, serta penjagaan ketat oleh satuan pengamanan. Kehadiran berbagai organisasi mahasiswa seperti GMNI, PMII, dan HMI MPO juga menunjukkan konsolidasi kekuatan intelektual muda dalam memperjuangkan agenda reformasi. Tuntutan mereka bukan sekadar simbolik, melainkan sangat jelas secara politik dan hukum. Melalui tajuk berita ini Kompas memberitakan mengenai mahasiswa sebagai pembawa aspirasi publik, Aksi mahasiswa dilaporkan berlangsung tertib, damai, dan disertai pernyataan resmi, yang menunjukkan bahwa gerakan ini adalah ekspresi politik konstitusional, bukan anarkis. secara tersirat dalam pemberitaan adalah penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR sebagai jalan keluar hukum yang sah untuk menyelesaikan krisis.

Hal ini Kompas, menunjukkan komitmennya pada prinsip penyelesaian damai melalui mekanisme negara, bukan melalui kekerasan jalanan atau kudeta sosial. *Framing* harian Kompas pada edisi 19 Mei 1998 memperlihatkan posisi media ini sebagai jembatan antara aspirasi publik dan kepentingan konstitusional. *Framing* tersebut membangun gerakan bagi mahasiswa sekaligus menekan pemerintah agar memberikan respons yang bertanggung jawab secara politik dan hukum. Gaya pemberitaan ini juga sejalan dengan karakteristik Kompas yang mengedepankan jurnalisme jalan tengah: bersikap kritis namun konstruktif, menghindari agitasi, dan tetap memprioritaskan stabilitas nasional.



Gambar 5. Arsip harian Kompas edisi 19 Mei 1998

Pada era orde baru, Kompas menghadapi tekanan dan sensor *pers* yang sangat ketat, namun demikian Kompas tetap berupaya menjaga independensinya melalui pendekatan yang lebih subtil seperti menyisipkan pesan-pesan kritik lewat bahasa simbolik, tajuk rencana, dan pilihan *framing* dalam laporannya. Ketika memasuki masa krisis politik dan ekonomi pada 1998. Kompas mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam menyuarakan keresahan publik, meskipun tetap dalam batas kerangka yang hati-hati. Kompas sebagai arus utama menunjukkan pergeseran sikap

dari gaya hati-hati menuju pemberitaan yang lebih terbuka terhadap kritik publik, dan memainkan peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas ditengah perubahan politik yang cepat, tajuk-tajuk utama yang menyoroti peristiwa Mei 1998 kegagalan pemerintah dan memberikan panggung suara mahasiswa dan masyarakat sipil (Nainggolan et al., 2024).

Umumnya surat kabar memberikan informasi politik. Surat kabar dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik melalui media massa. Kelahiran Kompas disertai dengan adanya konflik politik dan orde baru. Kompas berusaha memberikan gambaran yang seimbang tentang berbagai berita politik dan membantu masyarakat untuk memahami atas peristiwa yang terjadi. Melalui liputan dan analisis yang mendalam, Kompas meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam politik. Pemberitaan di Kompas sering memungkinkan diskusi publik tentang masalah penting, memberikan platform bagi berbagai perspektif dan pendapat.

Pemerintahan yang dipimpin Soeharto sejak tahun 1966 dikenal sebagai rezim otoriter yang sangat membatasi *pers*. Pemerintah memberlakukan Surat Izin Usaha Penerbit *Pers* (SIUPP), yang menjadikan izin terbit sebagai alat kontrol negara terhadap media massa. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan orde baru semakin memuncak, terutama karena maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang melemahkan kepercayaan publik. Puncaknya ketidakpuasan ini mendorong gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Pada awal tahun 1998, sejumlah demonstrasi diadakan di berbagai kota menuntut reformasi politik, penolakan Soeharto dan penghapusan korupsi.

Pemerintahan Orde Baru tidak hanya mengekang kebebasan *pers* melalui regulasi administratif seperti SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan *Pers*), tetapi juga melalui pendekatan ideologis dan koersif yang lebih luas. Negara menempatkan *pers* dalam posisi subordinat terhadap kepentingan politik penguasa, di mana setiap kritik terhadap pemerintah dianggap mengganggu stabilitas nasional (Eddyono, 2021). Ini menunjukkan bahwa fungsi *pers* sebagai pilar demokrasi benar-benar lumpuh dibawah dominasi negara. Media seperti Kompas harus mencari jalan tengah antara keberlangsungan hidup institusinya dan idealisme jurnalistiknya. Kompas menjadi contoh media arus utama yang berhasil bertahan dengan strategi peliputan yang cermat, tidak konfrontatif, namun tetap menyampaikan sinyal kritik melalui tajuk rencana dan rubrik opini. Kondisi politik yang represif, pilihan ini bukanlah bentuk kompromi yang lemah, melainkan strategi bertahan. Meski demikian, memasuki tahun 1998, kontrol terhadap media mulai runtuh seiring dengan semakin kuatnya desakan reformasi.

Kompas yang sebelumnya dikenal berhati-hati secara perlahan mengubah arah liputannya menjadi lebih kritis terhadap rezim. Tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei menjadi momen penting di mana Kompas secara terbuka memberitakan penderitaan rakyat, tuntutan mahasiswa, serta ketidakmampuan pemerintah dalam merespons krisis nasional. Hal ini menandai babak baru dalam jurnalisme Indonesia, di mana media tidak lagi tunduk penuh kepada kekuasaan, melainkan mulai berpihak pada suara masyarakat. Demikian mengubah pengalaman media seperti Kompas. era Orde Baru merupakan potret kompleks dari perjuangan kebebasan *pers* di bawah otoritarianisme. Media tidak selalu harus bersikap frontal untuk menunjukkan keberpihakan pada demokrasi; dengan situasi tertentu. Strategi bertahan secara halus menjadi satu-satunya cara agar pesan-pesan penting tetap bisa disampaikan kepada publik. Sejarah Kompas selama Orde Baru hingga tahun 1998 adalah bukti bahwa dalam ruang yang sangat sempit, jurnalisme tetap bisa menjadi alat perubahan sosial yang bermakna.

PENUTUP

Surat kabar Kompas didirikan pada tahun 1965 dengan semangat humanisme dan jurnalisme yang bertanggung jawab. Sejak awal Kompas dikenal sebagai media yang mengedepankan prinsip keseimbangan informasi, verifikasi, dan independensi redaksional. Dalam perjalanannya Kompas tidak hanya berfungsi sebagai sumber media informasi, tetapi juga menjadi rujukan dalam menyingkapi peristiwa-peristiwa penting. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, Kompas

memainkan peran penting sebagai media yang mendampingi transisi demokrasi di Indonesia, media ini tidak hanya memberi berita fakta politik, tetapi juga menyuarakan pentingnya pendidikan politik masyarakat, keterbukaan informasi, dan pengawasan publik terhadap pemerintahan. Peran edukatif dan moderatif Kompas sangat menonjol pada masa-masa awal reformasi, termasuk dalam menyeimbangkan narasi antara tuntutan perubahan dan stabilitas nasional.

Perspektif Kompas terhadap perubahan politik tahun 1998 ditampilkan secara moderat dan reflektif. Alih-alih mengiring opini dengan emosi atau provokasi, Kompas memilih pendekatan konstruktif dengan menyajikan berita-berita yang menenangkan legitimasi sosial (dukungan tokoh seperti Sultan Hamengkubuwono X), pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan urgensi pengawasan terhadap pemerintahan baru. *Framing* berita yang digunakan mengangkat nilai kemanusiaan dan intelektualitas, yang menjauhkan Kompas dari tendensi sensasional atau partisan. Secara keseluruhan Kompas menunjukkan karakter jurnalistik yang kuat dalam menyingkapi momen penting transisi demokrasi posisi sebagai media nasional yang menjadikan bagian penting dalam proses demokratisasi pasca reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfira, J., Mulawarman, W. G., & Rijal, S. (2019). Analisis Wacana Kritis Berita Politik dalam Surat Kabar Koran Kaltim. *Adjektiva: Educational Languages and Literature Studies*, 2(1), 20–30.
- Ananta Harvianty Putri*, & Haryadi. (2024). Frasa Endosentris Pada Surat Kabar Harian Kompas Edisi 14 Dan 15 Mei 2023. *BASINDO: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pembelajarannya*, Volume 8 Nomor 2.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Dewi, N. K. (2024). Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia. *HISTORIA VITAE*, 4(2), 76–90.
- Eddyono, A. S. (2021). Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam. *Komunika*, 8(1), 53–60.
- Effendy, Y. S. N. (2022). Analysis of Tempo and Kompas Online Media Framing Towards Reporting the Issues of The 2024 Presidential Election Postponement. *Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. QAULAN*, 3(2).
- Fitriany STKIP PGRI Sidoarjo, A., & Wibowo, S. (2019). Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Nilai-Nilai Multikultural Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darut Taqwa Purwosari Pasuruan. *Jurnal Edukasi*, 5(2).
- Hamidi, F. N. (2011). *Peran Harian Kompas dalam memelihara pluralitas di Indonesia*.
- Kompas, P. B. (n.d.). 50 tahun Kompas memberi makna: Kompas, 1965-2015. (No Title).
- Kompas.com. (2020). *Bung Karno, Sosok di Balik Nama Harian Kompas...*
- Kompas.com. (2022). *Awal Berdirinya Harian Kompas dan Upaya Melawan Monopoli Pemberitaan*.
- Kurniawan, A., & Nurcahyo, A. (2013). Pengaruh Dinamika Politik Indonesia Terhadap Eksistensi Harian Kompas (1965-2012). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 3(01).
- McQuail, D. (1987). *Mass communication theory: An introduction*. Sage Publications, Inc.
- McQuail, D. (2010). The future of communication studies: A contribution to the debate. *Media and Communication Studies Interventions and Intersections*, 27.
- Melani, S., Supadi, S., & Suryadi, S. (2019). Analisis frasa pada surat kabar harian rakyat bengkulu. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 3(2), 210–220.
- Muthaqin, F., Syam, H. M., & Wahyuni, P. (2021). Ideologi media dan framing pada pemberitaan perusakan rumah ibadah di Kompas dan Republika. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 63–82.
- Nainggolan, G. M. O., Akim, A., & Noviasih, G. W. P. (2024). Independent Journalism in the History of Indonesian Media Landscape: A Study Case of Kompas Gramedia. *Communication*, 15(2), 129–140.

- Romli, A. S. (2012). *Jurnalistik Praktis: Panduan Lengkap Menjadi Wartawan Profesional*. Nuasa Cendekia .
- Salman, D., Purwasito, A., & Rais, W. A. (2023). How media remembered the past: Framing analysis of the May 1998 tragedy in Indonesian print newspapers (1999-2008). *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 39(2), 312–324.
- Sari, L., Umamah, N., & Afita Surya, R. (n.d.). *The New Order Political Policy: The Prohibition of Literature Work by The Indonesian Government in 1966-1998*.
- Suharyanto, A. (2016). Jurnal Administrasi Publik Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat Newspapers as One of the Media Submission of Political Information on Political Participation Society. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 123–136. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik>
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210.
- Susilo, C. (2018). *Dari Aksi Hingga Pesta Demokrasi: Dinamika Partai Rakyat Demokratik Menuju Pemilu (1996-1999)* . Universitas Pendidikan Indonesia .
- Suwirta, A. (2017). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta. *INSANCITA*, 2(2).
- Wibowo, A. (2016). Rekonstruksi Fungsi Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 67–73.
- Wijayanto, & Masduki. (2024). “Polite Watchdog”: Kompas and Watchdog Journalism in Post-Authoritarian Indonesia. *The International Journal of Press/Politics*, 29(3), 628–645.
- Yuniarwan, K. (2011). *Pemberitaan Media Massa Mengenai Lembaga Kepresidenan (Studi Analisis Isi Perbandingan Pemberitaan Presiden RI Periode Pra Reformasi, Reformasi, dan Paska Reformasi pada Halaman Depan Surat Kabar Kompas Periode Januari-Maret Tahun 1995, 1999 dan 2005)*.